



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021**

# GAMBARAN UMUM

## KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk PID di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan pelaksanaan UU KIP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

## DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

Berkomitmen  
memberikan  
pelayanan informasi  
yang terbaik dan  
cepat, tepat waktu,  
biaya ringan dan cara  
sederhana bagi  
masyarakat.

Alamat Kantor :  
Jalan Soekarno Hatta  
No 705 Bandung  
Hotline (WA Only)  
0813-2171-7239



**BANGGA BUATAN  
INDONESIA**

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI  
PPID DISKUK JABAR



# GAMBARAN UMUM

## PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

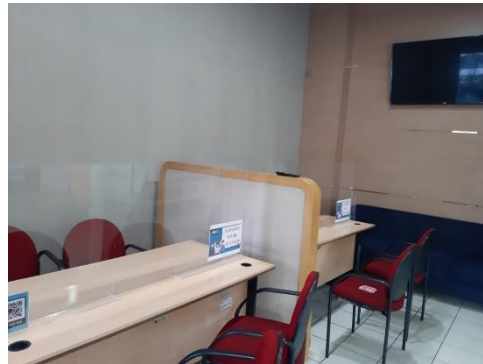
PPID Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berada dibawah PPID Utama Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pembantu bersama 45 PPID pembantu lainnya bersama-sama melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh pemohon informasi publik, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana elektronik yakni melalui website <https://www.diskukjabar.go.id> dan dapat langsung datang ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 705 Bandung atau melalui hotline (WA only) 0813-2171-7239.

Selain itu, dalam memberikan kenyamanan kepada pemohon informasi publik yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atau bertatap muka, kami menyediakan Desk Layanan Informasi dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki terus ditingkat dan dilengkapi.

### A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

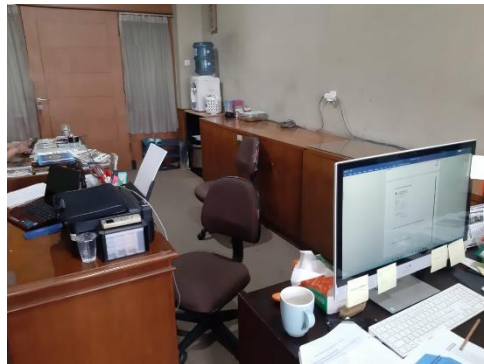
#### A.1. Meja Layanan Informasi



#### A.2. Sofa Tamu



### A.3. Ruang PPID



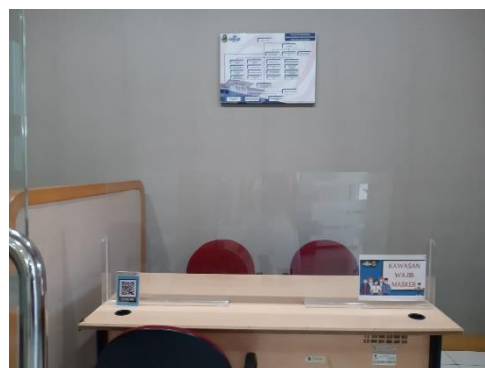
### A.4. Papan Pengumuman



### A.5. Buku Register Tamu



### A.6. Maklumat Pelayanan Informasi Publik



## A.7. Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik



## A.8. Formulir dan Tanda Bukti Pemohon Informasi Publik



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**  
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax (022) 7331978  
 Website: [www.diskuk.jabarprov.go.id](http://www.diskuk.jabarprov.go.id) e-mail: [diskukm@jabarprov.go.id](mailto:diskukm@jabarprov.go.id)  
 BANDUNG – 40286

### FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP-DUA)

No. Pendaftaran (isi petugas) : .....

Nama/ Organisasi Pemohon : .....  
 No. KTP/ SIM/ Paspor : .....  
 No. Akta Pendirian (untuk organisasi) : .....  
 No. SKT Kewbangpol (untuk organisasi) : .....  
 Alamat : .....

Pekerjaan : .....  
 Nomor Telepon : .....  
 e-mail : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....  
 (sampaikan jika ada bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi : .....  
 (sampaikan jika ada bila perlu)

Cara Memperoleh Informasi \*\* :  Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat\*\*  
 Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\* :  Mengambil langsung  
 Kurir  
 Pos  
 Faksimil  
 Email

Petugas Pelayanan Informasi : ..... Bandung, ..... 20...  
 (Panenna Pemohon) Pemohon

(.....) (.....)

**Keterangan:**  
 \*\*Harus diisi dengan berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik  
 \*\*Pilih salah satu dengan matrik bila tidak terdapat (X)  
 \*\*\*Lampirkan bila perlu.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**  
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax (022) 7331978  
 Website: [www.diskuk.jabarprov.go.id](http://www.diskuk.jabarprov.go.id) e-mail: [diskukm@jabarprov.go.id](mailto:diskukm@jabarprov.go.id)  
 BANDUNG – 40286

No. Pendaftaran : .....

### TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari pemohon/ pengguna informasi publik :

Nama : .....  
 Tanggal tanggal lahir : .....  
 No. ident. as (KTP/SIMPASPOR) : .....  
 Nama organisasi : .....  
 Informasi yang dirahankan : .....

Oleh Desk Layanan Informasi PPIID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada  
 Bandung, ..... 20...  
 Petugas Pelayanan Informasi : ..... Pemohon  
 (Panenna Pemohon)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**  
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax (022) 7331978  
 Website: [www.diskuk.jabarprov.go.id](http://www.diskuk.jabarprov.go.id) e-mail: [diskukm@jabarprov.go.id](mailto:diskukm@jabarprov.go.id)  
 BANDUNG – 40286

No. Pendaftaran : .....

### TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari pemohon/ pengguna informasi publik :

Nama : .....  
 Tanggal tanggal lahir : .....  
 No. ident. as (KTP/SIMPASPOR) : .....  
 Nama organisasi : .....  
 Informasi yang dirahankan : .....

Oleh Desk Layanan Informasi PPIID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada  
 Bandung, ..... 20...  
 Petugas Pelayanan Informasi : ..... Pemohon  
 (Panenna Pemohon)

(.....) (.....)

## A.9. Formulir Pemberitahuan Tertulis



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**  
 Jalan Soekarno-Hatta No 735 Telepon (022) 73320913, 73327715 Fax (022) 7331978  
 Website: [www.diku.kopprov.go.id](http://www.diku.kopprov.go.id) e-mail: [dukumkn@jabarprov.go.id](mailto:dukumkn@jabarprov.go.id)  
 BANDUNG – 40286

### PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal..... bulan.....tahun.....dengan nomor pendaftaran....., Kami menyampaikan kepada saudara/i:

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Nomor/Telepon/ email : .....  
 Tujuan permohonan : .....

Pemberitahuan sebagai berikut :

#### A. Informasi dapat dibagikan :

N O	HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK	KETERANGAN
1	Bentuk fisik yang tersedia **	<input type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman); <input type="checkbox"/> Hardcopy aslinya ditulis
2	Biaya yang dibutuhkan ***	<input type="checkbox"/> Peralihan Rp..... <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp..... <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp..... <input type="checkbox"/> Juknit Rp.....
3	Waktu penyelesaian	..... Hari kerja
4	Pengelasan penghapusan/pengubahan informasi yang diminta **** (jika ada) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	.....

#### B. Informasi tidak dapat dibagikan karena :

- Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
- Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ..... hari kerja
- Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan publik lain yaitu .....

Bandung.....20....  
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

.....

## B. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh bagian Kepegumas (Kepegawaian Umum dan Kehumasan). Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada bagian Kepegumas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 (lima) Orang.

## C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi bagian Kepegawaian, Umum dan kehumasan.

# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat membuat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2021.

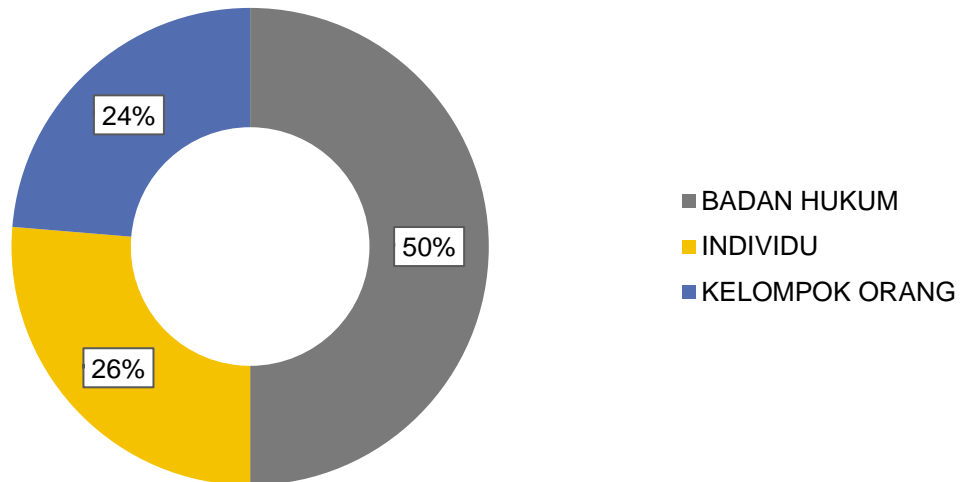
PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selama Januari-Desember 2021 menerima permohonan sejumlah 38 pemohon. Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada Januari-Desember 2021, didominasi pemohon individu sebanyak 26,3%, disusul pemohon dari badan hukum sebanyak 50% dan kelompok 23,7%.

### REKAPITULASI PEMOHON LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL (KUK) PROVINSI JAWA BARAT JANUARI-DESEMBER 2021

Bulan	Permohonan Informasi Publik	Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik	Pemohon Informasi		
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang
Januari	13	13	3	8	2
Februari	6	6	1	4	1
Maret	1	1	0	0	1
April	6	6	4	1	1
Mei	2	2	2	0	0
Juni	2	2	0	2	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	1	1	0	0	1
September	3	3	0	2	1
Oktober	0	0	0	0	0
November	2	2	0	2	0
Desember	2	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>

## KURVA JENIS PEMOHON INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2021

### PEMOHON INFORMASI



**Keterangan :**

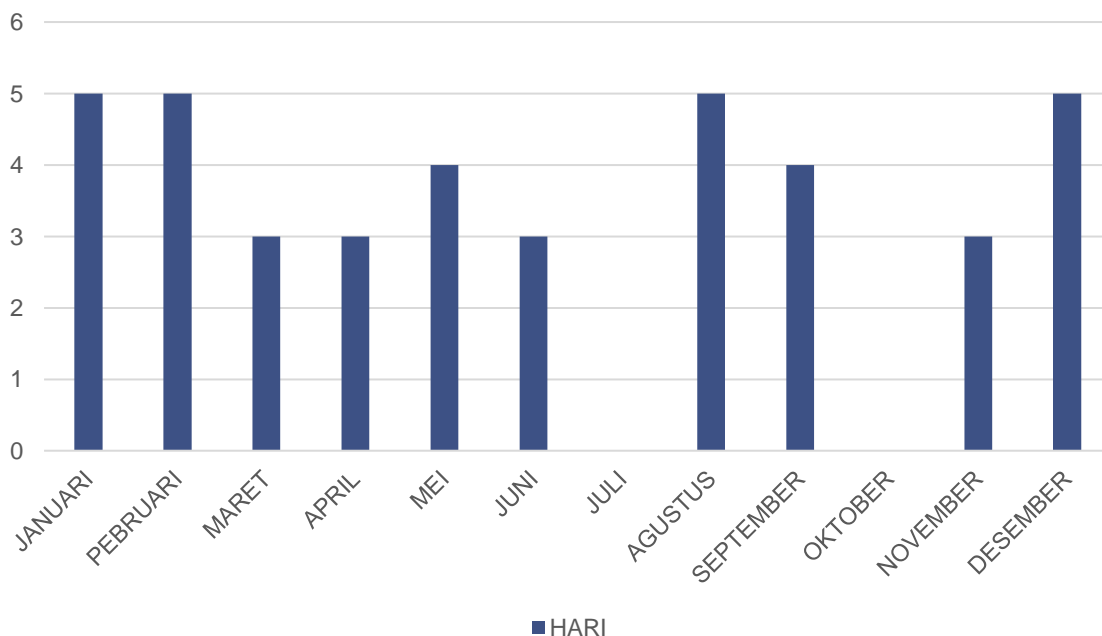
Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 didominasi pemohon individu sebanyak 26,3%, disusul pemohon dari badan hukum sebanyak 50% persen, kelompok sebanyak 23,7%.

## WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak
1	Januari	13	5 hari	13	-
2	Pebruari	6	5 hari	6	-
3	Maret	1	3 hari	1	-
4	April	6	3 hari	6	-
5	Mei	2	4 hari	2	-
6	Juni	2	3 hari	2	-
7	Juli	0	0	0	-
8	Agustus	1	5 hari	1	-
9	September	3	4 hari	3	-
10	Oktober	0	0	0	-
11	November	2	3 hari	2	-
12	Desember	2	5 hari	2	-
	Total	38	40 hari	38	0

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) permohonan informasi adalah 40 hari : 12 bulan = 3,3 hari atau 3 hari.

### RATA-RATA WAKTU PELAYANAN PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT



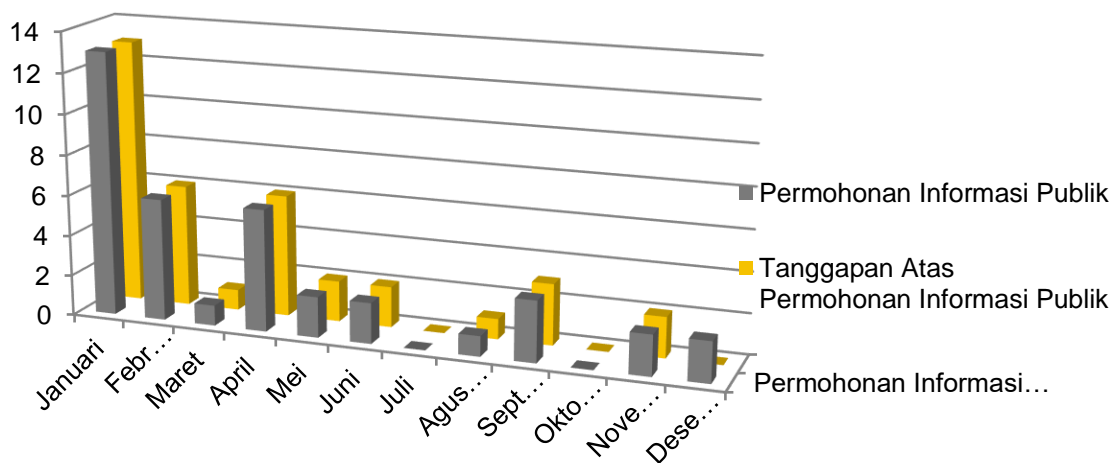
Keterangan :

Rata-rata waktu pelayanan permohonan informasi publik PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada periode Januari- Desember 2021

# JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Dari 38 pemohon informasi publik yang masuk ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat semuanya ditanggapi dan dikabulkan. Kebanyakan permintaan informasi untuk bahan penelitian, bahan kajian dan bahan paparan kegiatan.

## TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2021 PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT



Keterangan :

Data permohonan informasi publik yang masuk 100% ditanggapi oleh PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat.

# MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Bersama dengan 7 (tujuh) perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori perangkat daerah Tahun 2021 dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat dengan kualifikasi "Informatif". Adanya penghargaan ini memotivasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pelayanan.



# KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Koordinasi antara bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan informasi publik belum maksimal, sehingga waktu pelayanan agar tidak molor.
2. Jumlah SDM terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, komputer dan arsiparis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih minim.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga ada beberapa informasi yang kurang dikuasai Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Provinsi Jawa Barat.
4. Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik diantaranya :

1. Pengembangan sistem terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik ;
2. Membuat rancangan aplikasi e-PPID untuk memonitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai/ handphone.
3. Meningkatkan koordinasi antara PPID Pembantu dengan PPID Utama dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.
4. Rencana membuat database yang terintegrasi antara bidang dan UPTD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi untuk memudahkan akses data oleh publik.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT 2021

No	Tgl	Nama	Alamat	No Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Permohonan Informasi	Status Informasi		Bentuk Permohonan		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari/Bulan			
								Dipenuhi	Belum Dipenuhi	Sifat	Media	Belum	Belum			Periode	Periode	Daya	Car
								Ya	Tidak	Oral	Tulis	Elektronik	Non-Elektronik			Permohonan	Keputusan	Daya	Car
1	17/12/21	Dokter Spesialis Bedah Tumor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			8 Januari 2021		
2	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			8 Januari 2021		
3	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			8 Januari 2021		
4	11/1/21	Insan	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			12 Januari 2021		
5	19/1/21	Faktor Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
6	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
7	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
8	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
9	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
10	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
11	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
12	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
13	20/1/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		


14	17/12/21	Dokter Spesialis Bedah Tumor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			8 Januari 2021		
15	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			11 Januari 2021		
16	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			5 Januari 2021		
17	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			4 Januari 2021		
18	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Januari 2021		
19	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			2 Januari 2021		
20	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			19 Januari 2021		
21	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			3 April 2021		
22	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			11 April 2021		
23	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			19 April 2021		
24	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			20 April 2021		
25	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			4 April 2021		
26	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			7 Mei 2021		
27	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			22 Mei 2021		
28	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			3 Juni 2021		
29	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			4 Juni 2021		
30	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			4 Juni 2021		
31	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			15 Agustus 2021		
32	17/12/21	Manajemen Labor	Banjar	08113516481	08113516481	data laporan	Menyebutkan bahwa permohonan	Y		Y	Y			Ditolak			13 September 2021		

13	09/07/21	PT Nasional Label	Bandung	003/ 002/ PPDV/ NU/0	-	Data UMRM	Bahan Kapan	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan data diri bidang usaha kec.f	-	-	13 September 2021		
14	30/07/21	Kementerian RI Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Sektoral Kalimantan	Jakarta	5-303/ 001.3/ 2021	-	Data UMRM	Bahan Kapan	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan data diri bidang usaha kec.f	-	-	4 Oktober 2021		
15	17/11/21	Kemendag UMRM	Jakarta	8-1139/ KUMM/ Dep.1/ BK.DP/01/ 2021	-	Data Ekspor komoditas	Bahan Kapan	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan data diri bidang usaha kecil sebagian yang dimiliki oleh GSALE Jabar	-	-	19 November 2021		
16	23/11/21	Setdikabhar	Bandung	7344/ KB.05.05.01/ Adipin	-	Data Fasilitas penunjang media luar ruang	Bahan Kapan	√	-	-	√	-	-	√	Diberikan oleh sekretariat	-	-	30 November 2021		
17	2/12/21	Tani Mub	Jakarta	070.CDKP51-FH V 001.21	-			√	-	-	√	-	-	√	Diberikan bidang bidan bagian koperasi.	-	-	3 Desember 2021		
18	20/12/21	INSBAK Unpad	Bandung	2817/ UNP/INSBAK/ PT.01.01/ 2021	-			√	-	-	√	-	-	√	Diberikan data diri bidang usaha kec.f	-	-	27 Desember 2021		

Bandung, Februari 2022

Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
PPID Pembantu

Mengetahui  
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
Atasan PPID Pembantu

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM  
DAN KEHUMASAN,  
  
Dra. MEINI ROSITA, MM  
Pembina

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
  
SUHRA,SE\_MM,Ak  
PEMBINA Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978  
Website : [www.diskuk.jabarprov.go.id](http://www.diskuk.jabarprov.go.id) – email : [diskumkm@jabarprov.go.id](mailto:diskumkm@jabarprov.go.id)  
BANDUNG – 40286


Bandung, 26 Januari 2022

Kepada

Nomor	: 290 / KOM.04.01/ Kepegumas	Yth.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Hal	: <b>Rekap Laporan Layanan Informasi dan PPID</b>	di	Tempat

Memenuhi surat Nomor 447/KOM.04.01/IKP tertanggal 20 Januari 2022 Hal Rekap Layanan Informasi dan Data PPID, bersama ini disampaikan Rekap Laporan Layanan Informasi dan PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dokumen data, bentuk soft copy akan dikirim melalui email PPID Utama Provinsi Jawa Barat [ppid@jabarprov.go.id](mailto:ppid@jabarprov.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
an.KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
SEKRETARIS,  
  
SUHRA, SE., MM, Ak  
PEMBINA Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 290 / KOM.04.01/ Kepegumas  
 TANGGAL : 26 Januari 2022  
 TENTANG : Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 TAHUN 2021  
 PPID PROVINSI JAWA BARAT

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat  
 Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

No	No Register Pemohon	Tanggal Permohonan	Nama/ Badan Hukum Pemohon	Informasi yang di mohon	Keputusan (diberikan/ diberikan Sebagian/ ditolak)	Tanggal pemberitahuan tertulis/ pemberian informasi	Alasan penolakan (apabila permohonan ditolak)	Mengajukan keberatan/ tidak	Tanggapan Keberatan
1	01/PIP.1/21	4 Januari 2021	Direktur Reskrimsus Polda Jabar (B/18/Subdit III/ 1/2021)	Copy Data Koperasi	Diberikan	8 Januari 2021	-	-	-
2	02/PIP.1/21	6 Januari 2021	Diskominfo Jawa Barat (132/ST.03.01/STAT)	Data Koperasi, UMKM Jabar	Diberikan oleh BKK, BUK dan Perencanaan	10 Januari 2021	-	-	-
3	03/PIP.1/21	7 Januari 2021	Firmansyah (Bisnis Bandung) (08562038171)	Data Pertumbuhan UMKM Jawa Barat selama 2020	Diberikan oleh bidang Usaha Kecil	8 Januari 2021	-	-	-
4	04/PIP.1/21	11 Januari 2021	Resa (Protokol Gubernur) (0815.8456.2848)	Data Pemulihan Ekonomi UMKM di Jabar	Diberikan oleh bidang usaha kecil koordinasi Humas	12 Januari 2021	-	-	-
5	05/PIP.1/21	19 Januari 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (239/OD.01.01.01/ Pemotda)	Permintaan Data Dukungan	Diberikan oleh bagian perencanaan.	22 Januari 2021	-	-	-

				LPPD tahun 2020					
6	06/PIP.1/21	20 Januari 2021	Meini	Data Pelaku UMKM terdampak Bencana Banjir/ Longsor Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang	Diberikan bidang usaha kecil didukung data BPBD Jabar dan Kabupaten Sumedang	22 Januari 2021	-	-	-
7	07/PIP.1/21	22 Januari 2021	Universitas Al Ghifari (13/ R-3/PE/AKD/PER/ I/ 2021)	Permohonan data program unggulan UMKM Juara Provinsi Jawa Barat	Diberikan oleh Bidang Usaha Kecil	26 Januari 2021	-	-	-
8	08/PIP.1/21	21 Januari 2021	Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (406/ PT.09.04.01/ KSDM)	Data UMKM yang bergerak di bidang usaha pengolahan pangan lokal	Diberikan bidang usaha kecil	29 Januari 2021	-	-	-
9	09/PIP.1/21	22 Januari 2021	BPKAD Jabar (109/ KU.06.09/ Akiap)	Permohonan data dana bergulir (kredit mesra)	Diberikan bidang Usaha kecil	27 Januari 2021	-	-	-
10	10/PIP.1/21	21 Januari 2021	Kemenkop dan UKM RI (39/ SM/ 1/ 2021)	Data KUKM terdampak bencana	Diberikan bidang usaha kecil didukung data BPBD Jabar dan Kabupaten Sumedang	25 Januari 2021	-	-	-
11	11/PIP.1/21	26 Januari 2021	Kadin Jabar (0026a/ DP/ II/ 2021)	Permohonan Data UMKM dan Kop	Diberikan oleh BUK dan BKK	8 Februari 2021	-	-	-
12	12/PIP.1/21	28 Januari 2021	Bank Indonesia (23/96/DB/SRT/B)	Data UMKM	Diberikan oleh bidang Usaha Kecil data UMKM yang	2 Pebruari 2021	-	-	-

					difasilitasi Dinas KUK Jabar				
13	13/PIP.1/21	29 Januari 2021	BNP Kantor Purwakarta (NT.01.04/ 50.32.14/ I/ 2021)	Permintaan Data Peserta Program SHAT Lintas Sektor	Diberikan yang difasilitasi melalui Dinas KUK Jabar.	8 Februari 2021	-	-	-
14	14/PIP.2/21	1 Februari 2021	Dekopinwil Jabar (010/ Dekopin-010/JB/II/ 2021)	Permohonan Data Komoditi Perdagangan	Diberikan Sebagian yang kita miliki dan mengusulkan untuk ke Disperindag Jabar dan DKP Jabar	8 Februari 2021	-	-	-
15	15/PIP.2/21	1 Februari 2021	Kebangpol an. Popon (070/0115/SKP/II/2021)	Data Koperasi Syariah (untuk penelitian S3 Unpad)	Diberikan Sebagian sesuai data koperasi syariah yang dimiliki Dinas dan disarankan ke OJK.	11 Februari 2021	-	-	-
16	16/PIP.2/21	2 Februari 2021	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (427/154-Sekre)	Permohonan Data UMKM	Diberikan oleh bidang Usaha Kecil data UMKM yang difasilitasi Dinas KUK Jabar	5 Februari 2021	-	-	-
17	17/PIP.2/21	3 Februari 2021	BKD Provinsi Jawa Barat (205/ KPG.02/ PPIK/ 2021)	Pendataan Jumlah Total tenaga Non ASN	Diberikan oleh Kepegumas	4 Februari 2021	-	-	-
18	18/PIP.2/21	15 Februari 2021	BPBD Jabar (478/ TU.04/ II/ 2021)	Permohonan Data UMKM	Diberikan bidang usaha kecil	23 Februari 2021	-	-	-
19	19/PIP.2/21	26 Februari 2021	Setda Jabar (1128/ KO. 02.03.03/ BP2D)	Permohonan data indeks daya saing daerah 2021	Diberikan ke subbag perencanaan	2 Maret 2021	-	-	-
20	20/PIP.3/21	17 Maret 2021	KUD Raga Waru Kabupaten Cirebon (05/ KUD-RG/III/ 2021)	Permohonan Salinan akte pendirian koperasi dan badan hukum koperasi	Diberikan ke bidang kelembagaan	19 Maret 2021	-	-	-

21	21/ PIP.4/21	2 April 2021	Teguh (Diskomimfo) (0812.2245.5971)	Data Borongdong.id	Diberikan data dari BUK	3 April 2021	-	-	-
22	22/PIP.4/21	5 April 2021	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Kementan) Bogor (B-793/ LB.050/ A.II/ 04/ 2021)	Permohonan data dan informasi	Diberikan oleh BUK sesuai dengan data yang dimiliki DiskUK Jabar	12 April 2021	-	-	-
23	23/PIP.4/21	9 April 2021	Dwi Anjani (Adm Bisnis Politek Sukabumi) (135/ Polsmi/ AK/ III/21)	Permohonan Data OPOP wilayah Sukabumi 2019-2020	Diberikan oleh UPTD P3W dan data OPOP bisa di akses dilink opopjabar. Jabarprov.go.id	13 April 2021	-	-	-
24	24/PIP.4/21	21 April 2021	Rifqi (JDI) (081.420.749.419)	Data terkait UMKM Pelaku Ekraf Jawa Barat	Diberikan data dari BUK	22 April 2021	-	-	-
25	25/ PIP.4/21	22 April 2021	Teguh (Diskomimfo)	Data UMKM Digital	Diberikan data dari BUK	23 April 2021	-	-	-
26	26/PIP.4/21	29 April 2021	BPKAD Jabar (740/ KU.03.07/ BMD)	Permohonan Data Permasalahan Badan Milik Desa	Diberikan Sebagian karena data Desa ada Dinas Pemberdayaan Desa	6 Mei 2021	-	-	-
27	27/PIP.5/21	3 Mei 2021	a.n. Mufid Suryani SE, MMS., (Universitas Gunadharma/ 072/ S-3/ DIG/ UG/ VI/ 2021)	Permohonan Data UMKM	Diberikan data dari BUK	7 Mei 2021	-	-	-
28	28/PIP.5/21	22 Mei 2021	Yulistine (Unpad)	Data peserta OPOP 2019 dan 2020	Diberikan UPTD P3W dan data OPOP bisa di akses dilink opopjabar. Jabarprov.go.id	27 Mei 2021	-	-	-
29	29/PIP.6/21	16 Juni 2021	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	Permohonan Data dan Informasi	Permohonan Data dan informasi	21 Juni 2021	-	-	-

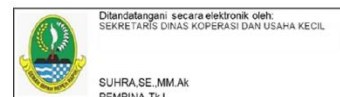
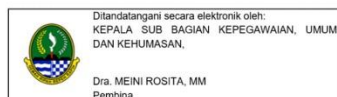
			(365/ BPPP.2/ SD/6/ 2021)						
30	30/ PIP.6/21	30 Juni 2021	Dinas KUKM Kab Karawang (518/332/ PPK)	Permohonan Data Kopontren Peserta OPOP tahun 2020 Provinsi Jawa Barat	Diberikan oleh UPTD P3W dan data OPOP bisa di akses dilink opopjabar. Jabarprov.go.id	2 Juli 2021	-	-	-
31	31/ PIP.8/21	10 Agustus 2021	Universitas Kuningan Fakultas Ekonomi (5688/ FE-UNIKU/ KNG/ LL/ 2021)	Permohonan Data Jumlah dan Profil UMKM di Jabar	Diberikan data dari BUK	15 Agustus 2021	-	-	-
32	32/ PIP.9/21	8 September 2021	KemenkumHAM RI Kanwil Jabar (W.II. UM. 01.01.7431)	Permohonan Data UMKM	Diberikan data dari BUK	13 September 2021	-	-	-
33	33/ PIP.9/21	9 September 2021	PT National Label (003/ 002/ PIPD/ NL. BD)	Permohonan Data UMKM	Diberikan data dari BUK	13 September 2021	-	-	-
34	34/ PIP.9/21	30 September 2021	Kemenkeu RI (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kerajinan) (s-105/KF.5/ 2021)	Permohonan Data UMKM	Diberikan data dari BUK	4 Oktober 2021	-	-	-
35	35/PIP.11/21	17 November 2021	Kemenkop UKM RI (B-1138/ KUKM/ Dep.3/ UK. 00/ XI/ 2021)	Permohonan data komoditas ekspor	Diberikan data dari BUK Sebagian yang dimiliki oleh DiskUK Jabar	19 November 2021	-	-	-
36	36/PIP.11/21	25 November 2021	Setda Jabar (7344/ KB.03.03.01/ Adpim)	Permintaan Data Fasilitas Penunjang Media Luar Ruang	Diberikan oleh sekretariat	30 November 2021	-	-	-

37	37/PIP.12/21	2 Desember 2021	Tani Hub (070.CORPST-THI/ XII/ 21)	Permohonan Data Koperasi	Diberikan bidang kelembagaan dan perencanaan	5 Desember 2021	-	-	-
38	38/ PIP.12/21	20 Desember 2021	INJABAR UNPAD (283/ UNG. INJABAR/ PT.01.01/ 2021)	Permohonan Data UMKM	Diberikan data dari BUK	27 Desember 2021	-	-	-

Bandung, 26 Januari 2022

Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
PPID Pembantu

Mengetahui  
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
Atasan PPID Pembantu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

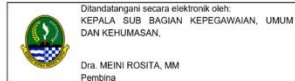
LAMPIRAN II SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 290 / KOM.04.01/ Kepegumas  
 TANGGAL : 26 Januari 2022  
 TENTANG : Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat

**REKAPITULASI LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 TAHUN 2021  
 PPID PROVINSI JAWA BARAT**

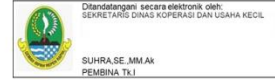
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat  
 Nama Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	13	5 hari	13	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	6	5 hari	6	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	3 hari	1	-	-	-	-	-	-
4	April	6	3 hari	6	-	-	-	-	-	-
5	Mei	2	4 hari	2	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	3 hari	2	-	-	-	-	-	-
7	Juli	0	0	0	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	5 hari	1	-	-	-	-	-	-
9	September	3	4 hari	3	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	0	0	-	-	-	-	-	-
11	November	2	3 hari	2	-	-	-	-	-	-
12	Desember	2	5 hari	2	-	-	-	-	-	-
	Total	38								

Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan  
 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
 PPID Pembantu,



Bandung, 26 Januari 2022  
 Mengetahui  
 Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
 Atasan PPID Pembantu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III : SURAT SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 290 / KOM.04.01/ Kepegumas  
 TANGGAL : 26 Januari 2022  
 TENTANG : Daftar Informasi Publik (DIP)

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT  
 JALAN SOEKARNO HATTA NO 705 BANDUNG**

Kepala Dinas : Drs. Kusmana Hartadji, MM.,

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP		KLARIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL			
<b>KESEKRETARIATAN</b>								
1	Profil Dinas KUK Jabar (Struktur, Tupoksi, visi misi, daftar pejabat dan alamat)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	-	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
2	Renstra (Rencana Strategis) 2018-2024	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
3	Rencana Kerja	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
4	Rencana Kinerja Tahunan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
5	Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang dijalankan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
6	Informasi tentang kinerja perangkat daerah beserta capaiannya	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
8	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)

9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
10	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Sekretariat/umum	Bandung 2020	-	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
11	Perjanjian Kinerja	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
12	Laporan Tahunan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
13	Laporan Triwulan	Sekretariat/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala(BK)
14	Indikator Kinerja Utama	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
15	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
16	Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
17	Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	Sekretariat/ Perencanaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DK)
18	Rencana dan realisasi Anggaran	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
19	Neraca	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
20	Laporan Keuangan	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
21	Laporan Arus Kas	Sekretariat/ keuangan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
22	Daftar Inventarisasi Aset	Sekretariat/ Umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
23	Profil PPID	Sekretariat / umum	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
24	Standar Pelayanan Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
25	Jumlah Pemohon Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
26	Laporan Permohonan Informasi	Sekretariat / umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)

27	Daftar Informasi Publik	Sekretariat / umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
28	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat / umum	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
29	Agenda dan Kegiatan-kegiatan Dinas	Sekretariat / umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
30	SOP kesekretariatan/ perencanaan/ keuangan, kelembagaan koperasi/ pemeriksaan dan pengawasan koperasi/ bidang pembiayaan koperasi/ bidang usaha kecil/ UPTD P3W	Sekretariat / umum	Bandung 2018	-	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
31	Daftar Pegawai Pensiun	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
32	Buku Daftar Hadir Tamu	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
33	Daftar surat masuk dan keluar	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
34	Agenda Kegiatan Kepala Dinas	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
35	Surat-surat perjanjian dengan pihak ke tiga berikut dokumen pendukung	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
36	Sambutan kegiatan di sekretariat	Sekretariat/ umum	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
<b>BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI</b>								
37.	Daftar koperasi primer dan sekunder tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
38.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitas di Jabar	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
39.	Koperasi di Jawa Barat yang sudah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	Bidang Kelembagaan Koperasi/ perencanaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala (BK)
40.	Tata Cara Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
41.	Tata Cara pengurusan ijin pembukaan kantor cabang/ kancab pembantu/ kantor kas (SOP)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
42.	Daftar Notaris pembuat akta koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

43.	Daftar Koperasi yang dibubarkan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
44.	Daftar Koperasi yang memperoleh penyuluhan/ advokasi pertemuan	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
45.	Daftar koperasi yang mendapatkan fasilitas temu konsultasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
46.	Data token koperasi dan koperasi berprestasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
47.	Data PPKL	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
48.	Data koperasi yang melakukan RAT tingkat provinsi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
49.	Data revitalisasi koperasi	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
50.	Daftar peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
51.	Daftar peserta koperasi Skala Besar yang mengikuti FGD	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
52.	Daftar peserta KUMKM yang mengikuti Gelar Produk Koperasi dalam Rangka Harkop ke-72	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
53.	Sambutan kegiatan kelembagaan (RAT, penyuluhan dll)	Bidang Kelembagaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI</b>								
54.	Daftar Koperasi yang memperoleh akses kredit perbankan	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
55.	Daftar koperasi yang mendapat fasilitas LPDB KUKM	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
56.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitas digitalisasi koperasi 2019	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
57.	Daftar koperasi yang memperoleh fasilitas Expo Pembiayaan 2019	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
58.	Daftar Peserta yang memperoleh hibah 2019	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DIK)
59.	Daftar peserta FGD Koperasi Susu	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
60.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Mesra	Bidang Pemberdayaan Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala

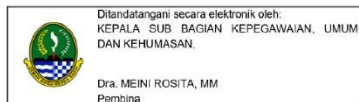
61.	Daftar peserta yang memperoleh Kredit Cinta Rakyat	Bidang Pemberdayaan Koperasi / Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
62.	Sambutan kegiatan di BPK	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
<b>BIDANG USAHA KECIL</b>								
63.	Daftar Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi akses kredit	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
64.	Daftar informasi produk Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
65.	Kegiatan fasilitasi inovasi produk dan sistem informasi	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
66.	Informasi pameran produk KUMKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
67.	Informasi tentang IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
68.	Kegiatan fasilitasi pembiayaan usaha kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
69.	Daftar peserta UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
70.	Daftar Pendamping UMKM Naik Kelas	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
71.	Daftar Peserta Gelar Produk dan Temu Bisnis UMKM Juara kabupaten/ kota	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
72.	Daftar peserta UMKM yang mengikuti pameran luar provinsi	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2019	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
73.	Daftar Peserta yang memperoleh fasilitasi Wirausaha Pemula	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
74.	Daftar Usaha Mikro penerima BLT UMKM Kemenkop dan UKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
75.	Daftar UMKM bantuan Masker	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
76.	Sambutan kegiatan di Bidang Usaha Kecil	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
78.	Daftar penerima Bantuan Pemprov Jabar bagi Usaha Mikro terdampak PPKM	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala
79.	Daftar UMKM yang mendapatkan fasilitasi hak merek 2021	Bidang Usaha Kecil	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Berkala

<b>BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>									
80.	Daftar koperasi yang memperoleh penilaian kesehatan	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
81.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kepatuhan	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
82.	Daftar koperasi yang memperoleh pembinaan aspek kelembagaan koperasi	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
83.	Daftar koperasi yang dalam pengawasan pemerintah	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	Dikecualikan (DIK)
84.	Daftar koperasi yang memperoleh sosialisasi tentang penerapan peraturan dan sanksi	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
85.	Daftar koperasi bermasalah dan proses kajian	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
86.	Jumlah pengaduan koperasi	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
87.	Laporan hasil penyelesaian pengaduan	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
88.	Sambutan kegiatan di BPPK	Bidang dan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)
<b>UPTD PELATIHAN &amp; PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DAN WIRUSAHA</b>									
89.	Jenis pelatihan perkoperasian	UPTD P3W		Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
90.	Jenis pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W		Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
91.	Tatacara mengikuti pelatihan wirausaha	UPTD P3W		Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK

92.	Tatacara mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
93.	peserta yang mengikuti pelatihan perkoperasian	UPTD P3W	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
94.	peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	UPTD P3W	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
95.	Informasi penyelenggaraan/ pelaksanaan pelatihan	UPTD P3W	Bandung 2020	√	√	Selama berlaku	masih	BK
96.	Direktori wirausaha baru 2018	UPTD P3W	Bandung 2018	√	√	Selama berlaku	masih	BK
97.	Data pendamping koperasi dan UMKM	UPTD P3W	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	BK
98.	Daftar peserta Program One Pesantren One Product (OPOP)	UPTD P3W	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	BK
99.	Daftar Peserta OPOP lolos audisi tahap 1, tahap 2 hingga provinsi dan Audisi 3 memperoleh hadiah	UPTD P3W	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	BK
100.	Daftar Pendamping OPOP	UPTD P3W	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	BK
101.	Sambutan kegiatan UPTD P3W	UPTD P3W	Bandung 2021	√	√	Selama berlaku	masih	Setiap Saat (SS)

Bandung, 26 Januari 2022

Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
PPID Pembantu,



Mengetahui  
Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selaku  
Atasan PPID Pembantu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


LAMPIRAN IV Laporan SP4N Lapori Provinsi Jawa Barat  
 NOMOR : 290/ KOM.04.01/ Kepegumas  
 TANGGAL : 26 Januari 2022  
 TENTANG : Laporan SP4N Lapori Provinsi Jawa Barat Tahun 2021


LAPORAN SP4N LAPORI PROVINSI JAWA BARAT  
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT  
 TAHUN 2021

No.	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Judul Aduan	Ringkasan Laporan Aduan	Verifikasi	Klarifikasi	Kategori	Penyelesaian
1.	16 Mei 2021	BANPRES	Informasi UMKM	Kapan UMKM Gelombang 3 dibuka?		Pendaftaran program BPUM 2021 telah dibuka sejak tanggal 1 April 2021. Besaran yang diterima oleh penerima senilai 1,2 Juta. Angka ini berbeda dengan program BPUM tahun sebelumnya, begitupun dengan mekanisme pendaftaran BPUM tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020, dimana para calon penerima mendaftarkan langsung hanya ke Dinas di Kabupaten/Kota, sesuai Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6, Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil, menengah		Bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria : a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; c. Memiliki Usaha Mikro yang dibutuhkan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta kamoirannya yang merupakan satu kesatuan; dan d. Bukan ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD e. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan KUR f. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat

						Kabupaten/Kota".		melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)  Dapat mengajukan sebagai calon penerima BPUM dengan membawa kelengkapan berkas ke Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah di kabupaten/kota mulai awal April sd 20 April 2021 (Periode 1 Tahun 2021) dan pengajuan setelah tanggal tersebut akan di proses ke periode berikutnya, sampai dengan september 2021.
2.	16 Mei 2021	BANPRES	Korupsi Dana Bansos UMKM	Oknum Pegawai Desa memotong uang bantuan UMKM sebesar Rp. 500,000 + 20,000 (Ketika Daftar)		Dinas KUK Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi dengan UMKM Kabupaten Bogor tentang adanya "BLT UMKM di Desa Gintung Cilejet Kecamatan Parung Panjang disunat Oknum" untuk ditindaklanjuti di lapangan.		Pihak Dinas KUKM Kabupaten Bogor akan melakukan verifikasi lapangan dan berkomunikasi dengan Forum UKM Kecamatan Parung Panjang dan Desa Gintung untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.  Sejak diluncurkan program BLT UMKM (BPUM) ini, pihak Dinas KUK Provinsi Jawa Barat beserta Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten/Kota telah mensosialisasikan Kembali ke tingkat Kecamatan sampai Desa, bahwa tidak ada pemotongan biaya apapun

								<p>dalam pencairan BPUM.</p> <p>Masyarakat harus berhati-hati terkait BPUM sebab banyak berita dan isu yang menyesatkan. Sebaiknya hubungi dinas KUMKM di kabupaten/ kota untuk informasi tentang BPUM. Bila ada kasus dilapangan sebaiknya masyarakat segera melapor ke Dinas KUKM Kabupaten/Kota dimana anda tinggal untuk segera ditindaklanjuti.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--


 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM  
 DAN KEHUMASAN,  
 Dra. MEINI ROSITA, MM  
 Pembina


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
 PROVINSI JAWA BARAT,  
 Drs. KJSMANA HARTADJI, M.M  
 Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**

Jl. Soekarno Hatta No. 705 Telepon (022) 7320913, 7302775 Fax. (022) 7331978  
Website : [www.diskuk.jabarprov.go.id](http://www.diskuk.jabarprov.go.id) – email : [diskumkm@jabarprov.go.id](mailto:diskumkm@jabarprov.go.id)  
BANDUNG – 40286

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : KEP. 46 / KP. 16. 01 / KEP. 60 / MAS**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E);

14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

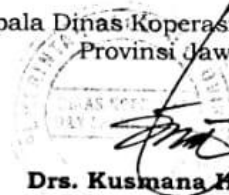
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PPID mempunyai fungsi:
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  - Pelayanan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik;
  - Pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
  - Pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - Pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
  - Pengkoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan antar lembaga;
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, PPID Pembantu berkoordinasi dengan PPID Utama.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat,



**Dr. Kusmana Hartadji, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670319 199403 1 001

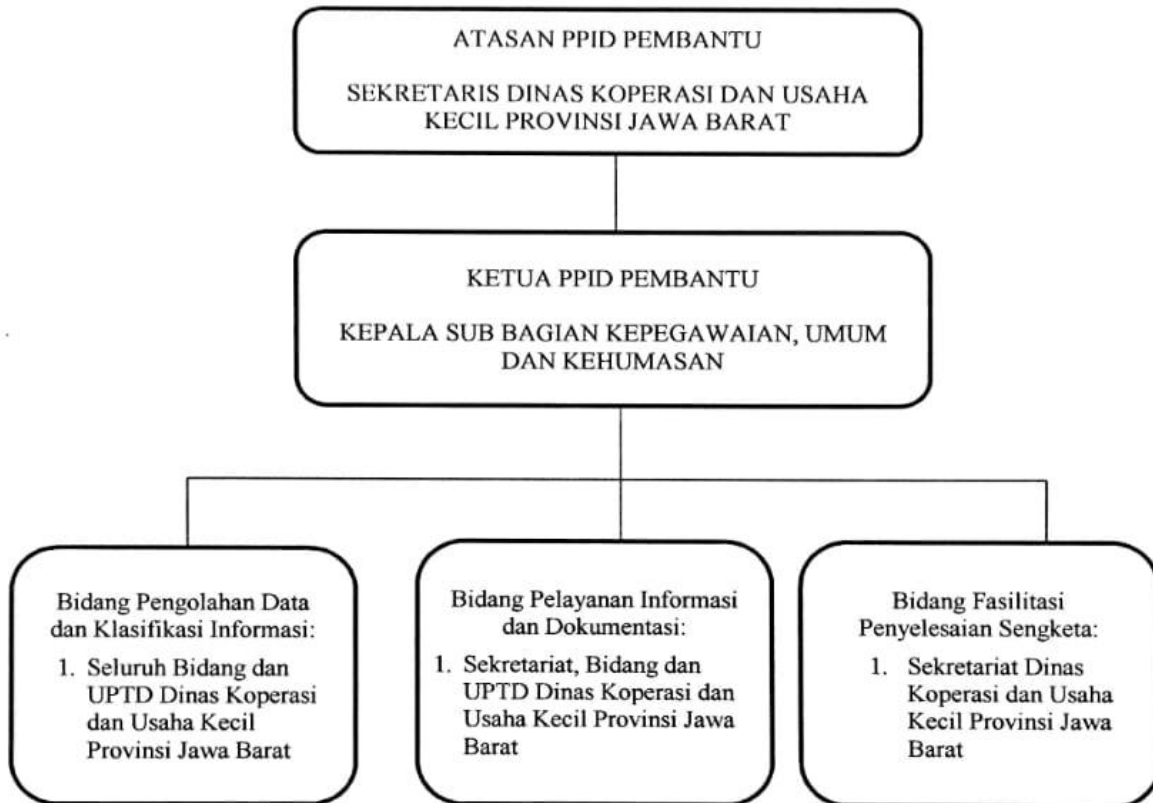
Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kep. 46 / KPG. 16.01 / KEPEGUMAS

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas  
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat,

**Drs. Kusmana Hartadji, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670319 199403 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kep. 46 / KPG. 16.01 / KEPEGUMAS

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas  
Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

#### URAIAN TUGAS

- I. Atasan PPID Pembantu:
  - a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
  - b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
  - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
  - d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.
- II. PPID Pembantu:
  - a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja;
  - d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi Perangkat Daerah;
  - e. Membentuk petugas pelayanan informasi pada Perangkat Daerah, yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
  - f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
  - g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
  - h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
  - i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pembantu;
  - j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
  - k. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
  - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
  - c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
  - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
  - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Menyelenggarakan administrasi, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
  - c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
  - d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
  - f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- V. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
  - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
  - b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;

- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil  
Provinsi Jawa Barat,



**Drs. Kusmana Hartadji, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670319 199403 1 001